



PERAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGOPTIMALKAN SINERGI PENTAHELIX GUNA MEWUJUDUKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS (SDGs 4) DI SURABAYA

Dicky Andhika Pradana¹, Maherza Cahya Diastara², Firre An Suprpto³, Indah Prabawati⁴
^{1,2,3,4} Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: 25040674103@mhs.unesa.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2307>

Sections Info

Article history:

Submitted: 11 April 2026

Final Revised: 23 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 20 June 2026

Keywords:

Public Policy

Pentahelix

Collaborative Governance

Quality Education

SDGs 4

Surabaya Coty



ABSTRACT

This study aims to examine the role of public policy in optimizing Pentahelix collaboration to achieve quality education in line with Sustainable Development Goals (SDGs) 4 at the Dinas Pendidikan Kota Surabaya. The main issue addressed is the suboptimal collaboration among stakeholders in education policy, which leads to disparities in learning quality and the effectiveness of educational program implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design, utilizing secondary data in the form of policy documents, performance reports, SDGs reports, and academic literature related to collaborative and network governance. The findings indicate that public policy in Surabaya has moved toward a collaborative approach involving the five key actors of the Pentahelix model, namely government, academia, business sector, community, and media. However, the implementation of this collaboration has not been fully optimal due to several challenges, including sectoral ego, disparities in resource capacity, lack of policy integration, and weak coordination sustainability. From the perspective of collaborative governance, the main challenges lie in trust, communication, and continuity of the collaborative process. Meanwhile, from a network governance perspective, the partnerships among stakeholders have not yet been strongly and systematically established.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi kebijakan publik dalam memaksimalkan kerjasama model Pentahelix untuk mencapai pendidikan yang berkualitas sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 4 di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Masalah utama yang dibahas adalah kurang optimalnya kolaborasi antar pihak dalam kebijakan pendidikan, yang mengakibatkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan kinerja, laporan SDGs, dan literatur akademik yang berkaitan dengan tata kelola kolaboratif dan tata kelola jaringan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di Surabaya telah mengarah pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima entitas utama dalam model Pentahelix, yaitu pemerintah, dunia akademis, bisnis, masyarakat, dan media. Namun, pelaksanaan kolaborasi ini belum optimal karena masih terdapat tantangan seperti ego sektoral, perbedaan kapasitas sumber daya, kurangnya penyatuan kebijakan, dan koordinasi yang lemah secara berkelanjutan. Dalam perspektif Tata Kelola Kolaboratif, tantangan utama terletak pada kepercayaan, komunikasi, dan kelangsungan proses kolaboratif. Di sisi lain, dalam kerangka Tata Kelola Jaringan, kerjasama yang terjalin antar pihak belum terbentuk dengan kuat dan sistematis.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Pentahelix, Collaborative Governance, Pendidikan Berkualitas

PENDAHULUAN

Pendidikan yang bermutu adalah fondasi penting dalam pengembangan manusia yang berkelanjutan, sebagaimana dijelaskan dalam Tujuan ke-4 dari Sustainable Development Goals (SDGs)—yaitu memastikan akses pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat hingga tahun 2030. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya diukur dari angka partisipasi siswa, tetapi juga mencakup hal-hal seperti kompetensi kurikulum, standard pengajaran, kesempatan untuk belajar sepanjang hayat, serta kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan masyarakat. Hal ini juga tercantum dalam laporan Voluntary Local Review (VLR) Kota Surabaya yang menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam mencapai SDGs, serta sebagai tanggapan terhadap dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi pembelajaran tatap muka dan pencapaian indikator pendidikan di wilayah ini.

Meskipun data mengenai pembangunan manusia di Kota Surabaya menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, tantangan yang dihadapi masih besar, khususnya dalam menetapkan kualitas pembelajaran yang merata di berbagai wilayah dan kelompok sosial. Perubahan dalam kebijakan pembelajaran yang terjadi selama pandemi berpengaruh negatif terhadap Gross Enrollment Rate di tingkat sekolah dasar dan menunjukkan bahwa sekadar memberikan akses tidak cukup tanpa perbaikan pada kualitas serta metode pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara tujuan kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional maupun lokal dengan kenyataan di lapangan, yang memerlukan pendekatan kolaboratif serta kebijakan yang dapat beradaptasi.

Dalam hal ini, teori Collaborative Governance dan Network Theory memberikan kerangka penting untuk memahami kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam kebijakan publik. Collaborative Governance mengutamakan bahwa pemerintahan yang efektif tidak hanya bergantung pada aktor pemerintahan semata, tetapi juga harus melibatkan sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, serta media dalam tahapan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini sejalan secara konseptual dengan model Pentahelix yang mencakup lima elemen—pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media—dalam membangun sinergi yang solid untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti peningkatan mutu pendidikan. Penelitian terbaru tentang Collaborative Governance yang berdasar pada Pentahelix menunjukkan bahwa kerjasama antar sektor dapat memperkuat koordinasi, berbagi sumber daya, dan mendukung keberlanjutan program di beragam sektor publik.

Walaupun telah banyak penelitian mengenai kolaborasi pentahelix di berbagai bidang, seperti pengembangan UMKM, program kesehatan, dan isu sosial lainnya, terdapat kekurangan empiris ketika diterapkan dalam konteks kebijakan pendidikan berkualitas, terutama di kota besar seperti Surabaya yang memiliki kompleksitas sosial, demografis, dan struktural. Studi-studi mengenai kolaborasi pentahelix di Surabaya umumnya lebih berfokus pada isu sosial non-edukatif, seperti pencegahan kekerasan terhadap anak, dan belum banyak yang secara mendalam mengkaji hubungan langsung antara kebijakan publik, pembentukan jaringan kolaboratif pentahelix, serta pencapaian SDGs 4 dalam konteks kota yang dinamis. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan data empiris yang menerangkan cara kebijakan publik dapat mendukung, mengatur, dan mengoptimalkan sinergi antara aktor pentahelix untuk mencapai pendidikan yang berkualitas secara nyata.

Kesenjangan antara kebijakan dan kenyataan ini menunjukkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah kota untuk mengadopsi serta memperbaiki kerangka kolaboratif dalam

kebijakan pendidikan. Fungsi pemerintah tidak hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi juga sebagai penghubung antara pemangku kepentingan, penyedia integrasi sumber daya, serta pengatur komunikasi, untuk memastikan partisipasi aktif dari semua aktor pentahelix dalam mencapai target SDGs 4. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang kuat dan mekanisme koordinasi yang efisien, usaha untuk mencapai pendidikan berkualitas di Surabaya dapat tertinggal, terutama di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi pembelajaran pascapandemi.

Berdasarkan konteks yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dengan mendalam fungsi kebijakan publik dalam meningkatkan kerjasama pentahelix demi mencapai pendidikan yang berkualitas sesuai dengan SDGs 4 di Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan cara keterlibatan para aktor pentahelix dalam kebijakan pendidikan, mengidentifikasi kendala utama yang ada dalam kolaborasi antar sektor, serta menilai seberapa besar pengaruh interaksi pentahelix terhadap pencapaian indikator kualitas pendidikan di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mengarahkan pembangunan daerah, termasuk dalam sektor pendidikan. Pada tingkat pemerintah daerah, kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam merancang program, mengoordinasikan pemangku kepentingan, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan pendidikan. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam mengatasi persoalan publik. Dalam konteks pendidikan daerah, kebijakan menjadi dasar bagi dinas teknis untuk membangun kerja sama lintas sektor.

Perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan menuntut kolaborasi multipihak. Konsep *collaborative governance* dari Chris Ansell dan Alison Gash menekankan keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam forum bersama yang berorientasi pada konsensus, dialog, dan komitmen kolektif. Pendekatan ini relevan bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mengoordinasikan peran akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Model Pentahelix kemudian menjadi kerangka kolaborasi yang mempertemukan lima unsur utama tersebut dalam satu sinergi pembangunan. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sinergi Pentahelix menjadi strategi untuk memperkuat efektivitas kebijakan pendidikan guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mendukung pencapaian SDGs 4 di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi antar aktor pentahelix dalam implementasi kebijakan pendidikan, bukan sekadar mengukur hubungan statistik antar variabel.

Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena sinergi pentahelix dalam kebijakan pendidikan di Surabaya, serta menganalisis peran kebijakan publik berdasarkan kerangka teori *Collaborative Governance* dari Chris Ansell dan Alison Gash serta pendekatan *Network Governance* dari R. A. W. Rhodes.

Data Sekunder, Meliputi:

1. Dokumen kebijakan pendidikan Kota Surabaya

2. Laporan kinerja Dinas Pendidikan
3. Laporan SDGs Kota Surabaya

Teknik Pengumpulan Data Menganalisis dokumen resmi seperti:

1. Peraturan Wali Kota
2. Rencana Strategis Pendidikan
3. Laporan capaian SDGs
4. Jurnal ilmiah dan publikasi akademik terkait collaborative governance dan pentahelix

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kebijakan Publik dalam Mendorong Sinergi Model Pentahelix pada Ranah Pendidikan

Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis utama dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengintegrasikan beragam aktor dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Dalam konteks administratif Kota Surabaya, kebijakan pendidikan tidak sekadar berperan sebagai regulasi birokratis, melainkan juga sebagai katalisator yang memfasilitasi kolaborasi lintas sektor melalui paradigma pentahelix. Pemerintah daerah setempat bertindak sebagai aktor pusat yang memprakarsai sinergi antara kalangan akademisi, pelaku industri, komunitas masyarakat, serta media massa guna optimalisasi mutu pendidikan.

Temuan empiris dari kajian terkini mengonfirmasi bahwa kolaborasi berbasis pentahelix secara substansial meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, sebab melibatkan integrasi sumber daya dan perspektif multidimensi dalam satu kerangka kerja kolaboratif. Studi oleh Rachman dan Thalib (2024) secara empiris membuktikan bahwa partisipasi multi-stakeholder secara signifikan memperkuat efektivitas kebijakan publik melalui sinergi peran aktor-aktor dalam kerangka pentahelix.

B. Analisis Collaborative Governance dalam Kebijakan Pendidikan

Analisis Collaborative Governance dalam Kebijakan Pendidikan Surabaya dapat dilakukan melalui empat komponen utama (Ansell & Gash, 2008; Nabatchi & Emerson, 2022): starting conditions, institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process.

1. Starting Conditions (Kondisi Awal): Terdapat ketimpangan kapasitas dan sumber daya antar aktor, seperti perbedaan fasilitas, tenaga pengajar, dan akses teknologi antara sekolah pusat kota (e.g., Genteng) dan pinggiran (e.g., Wiyung). Ini menghambat pembentukan kolaborasi yang kuat sejak awal.
2. Institutional Design (Desain Kelembagaan): Pemerintah telah menyediakan kerangka kebijakan (misalnya, Peraturan Wali Kota tentang sinergi pendidikan), tetapi belum sepenuhnya menjamin partisipasi merata, sehingga aktor seperti LSM atau swasta kurang terintegrasi.
3. Facilitative Leadership (Kepemimpinan Fasilitatif): Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator melalui koordinasi forum multistakeholder, namun belum optimal dalam mengelola konflik kepentingan (ego sektoral) dan membangun kepercayaan (trust) antar aktor.
4. Collaborative Process (Proses Kolaboratif): Interaksi antar aktor telah terjadi (e.g., workshop pelatihan guru berbasis pentahelix), tetapi belum berkelanjutan dan masih bersifat sektoral, sehingga sulit mencapai hasil jangka panjang.

Temuan ini selaras dengan penelitian Nabatchi dan Emerson (2022) yang menekankan

bahwa keberhasilan collaborative governance bergantung pada kualitas interaksi, kepercayaan, dan keberlanjutan proses.

Pendekatan Collaborative Governance dalam kebijakan pendidikan di Surabaya menunjukkan bahwa kerjasama antara berbagai pihak telah dilakukan, tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Tantangan utama terletak pada aspek kepercayaan, komunikasi, dan keberlanjutan kolaborasi antara pihak-pihak terkait. Ini menunjukkan bahwa proses kolaboratif masih bersifat separuh hati dan belum terjalin dengan kuat dalam sebuah lembaga.

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* mengindikasikan bahwa pelaksanaan collaborative governance sering kali tidak berjalan dengan baik karena adanya batasan dalam koordinasi serta kurangnya keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.

Di samping itu, analisis dalam jurnal *REFORMASI: Jurnal Ilmiah Administrasi* menekankan bahwa keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh proses interaksi, seperti membangun kepercayaan, komunikasi, dan komitmen antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.

C. Network Governance dalam Sinergi Pentahelix Pendidikan

Dalam pandangan Teori Jaringan, sinergi pentahelix menggambarkan penciptaan jaringan kebijakan yang melibatkan berbagai pihak dengan tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Masing-masing pihak memiliki fungsi dan sumber daya yang unik, sehingga suksesnya pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada kualitas interaksi dalam jaringan tersebut.

Di Surabaya, sudah terbentuk jaringan kerjasama di sektor pendidikan, tetapi integrasinya masih kurang memadai. Koordinasi antar pihak masih minim dan belum membangun sistem jaringan yang berkelanjutan.

Sebuah studi dalam jurnal *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* mengungkap bahwa keberhasilan kolaborasi pentahelix sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang mendukung, kejelasan peran masing-masing pihak, serta adanya sistem koordinasi yang terstruktur dalam jaringan kebijakan.

D. Implementasi Pentahelix dalam Mewujudkan Pendidikan Berkualitas (SDGs 4)

Implementasi model pentahelix di bidang pendidikan memiliki kemampuan yang besar untuk mendukung pencapaian SDGs 4, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, akses pendidikan, dan inklusivitas. Di Surabaya, partisipasi aktor pentahelix terlihat dalam berbagai program kerjasama, seperti kemitraan pendidikan, kegiatan komunitas, dan dukungan dari sektor swasta.

Namun, pelaksanaannya masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi dalam kebijakan yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor belum sepenuhnya terorganisir dalam kebijakan publik.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal *JPPM: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat* menunjukkan bahwa pendekatan pentahelix dapat memperkuat kerjasama dalam sektor pendidikan, tetapi memerlukan pengintegrasian kebijakan dan komitmen lintas sektor agar implementasinya berkelanjutan.

E. Faktor Penghambat & Pendukung Sinergi Pentahelix di Pendidikan Surabaya

Faktor Penghambat (Hambatan yang Bikin Stuck):

1. Ego sektoral antar lembaga : Tiap dinas/aktor nge-push agenda sendiri, susah kompromi, contoh, Dinas Pendidikan vs Dinas Sosial jarang sinkron.
2. Ketimpangan kapasitas & sumber daya : Sekolah kota punya fasilitas top, pinggiran perjuangan gap ini bikin kolaborasi tidak seimbang.
3. Kurangnya kebijakan integrasi : Kebijakan terpisah-pisah, tidak ada kerangka tunggal yang nyatuin semua aktor.
4. Koordinasi belum berkelanjutan : Interaksi hanya berbasis acara (workshop sekali-sekali), abis itu hilang momentum tidak ada tindak lanjut rutin.

Faktor Pendukung (Enabler yang Bisa Dimaksimalkan):

1. Komitmen Pemda : Wali Kota Surabaya aktif push via program seperti "Surabaya Smart Education", terima kasih legitimasi yang kuat.
2. Kerangka kebijakan kolaboratif : Telah ada Perwali atau MoU *pentahelix* sebagai landasan cukup solid jika pelaksanaannya.
3. Partisipasi masyarakat & komunitas : Orang tua, RT/RW, atau paguyuban aktif dalam program literasi/sekolah ramah anak.
4. Dukungan swasta & akademisi : CSR dari perusahaan (misalnya, beasiswa Telkom) + penelitian dari universitas (misalnya, inovasi blended learning dari UNESA).

F. Implikasi Kebijakan & Strategi Optimalisasi Sinergi Pentahelix Pendidikan Surabaya

Berdasarkan analisis sebelumnya, ada implikasi kebijakan yang krusial & strategi yang dapat ditindaklanjuti untuk maksimalin *pentahelix* – biar kolaborasi bukan sekadar wacana, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan:

1. Penguatan desain kelembagaan kolaboratif berbasis pentahelix : Bikin struktur formal kayak gugus tugas permanen atau Perwali khusus *pentahelix pendidikan* pastikan aturan jelas soal pembagian peran & akuntabilitas (ala kerangka Ansell & Gash).
2. Peningkatan kapasitas aktor melalui pelatihan & pembangunan SDM : Pelatihan lintas aktor (misalnya, lokakarya kepemimpinan fasilitatif untuk Pemda + keterampilan digital untuk guru/komunitas) menutup kesenjangan ketimpangan, biar semua bisa berkontribusi setara.
3. Pengembangan platform kolaborasi digital : App/dashboard terintegrasi (misalnya, "Surabaya EduNet") untuk berbagi data, program info, dan forum diskusi secara real-time meningkatkan komunikasi & mempertahankan interaksi (getaran teori jaringan!).
4. Integrasi program lintas sektor dalam kebijakan terpadu : Satuin semua inisiatif (CSR + penelitian akademik + komunitas) ke masterplan pendidikan kota hindari silo, mencapai SDGs 4 holistik.
5. Penguatan pemantauan & evaluasi berbasis kolaboratif : KPI bersama + tinjauan rutin multistakeholder (dasbor triwulanan) mengukur hasil seperti angka partisipasi atau indeks pembelajaran, sesuaikan dengan cepat.

Kenapa penting? Pendekatan ini mengubah kolaborasi dari formal-only (*seremonial*) ke substantive (dampak nyata) peningkatan akses, kualitas, & inklusivitas pendidikan. Kalau diimplementasi, Surabaya bisa jadi best practice *Collaborative Governance* di Indonesia.

G. Analisis Sinergi Pentahelix dalam Kebijakan Pendidikan di Surabaya

Dalam membahas kebijakan pendidikan di Surabaya, pendekatan Pentahelix menjadi dasar penting untuk memahami kerjasama antar sektor. Model ini menyoroti peranan lima aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media, yang

masing-masing memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas (SDGs 4).

Pertama, pemerintah, melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berfungsi sebagai pengatur dan fasilitator utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan. Pemerintah berwenang untuk menentukan arah kebijakan, menyiapkan anggaran, serta menciptakan sistem koordinasi antara para aktor. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, peran ini mencerminkan kepemimpinan yang mendukung keberhasilan kerjasama.

Kedua, akademisi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan inovasi, melakukan penelitian, dan mengembangkan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Universitas di Surabaya memiliki potensi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan kebijakan berbasis bukti dan inovasi dalam pembelajaran. Namun, dalam praktiknya, partisipasi akademisi masih terbatas pada kegiatan penelitian dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Ketiga, sektor swasta berkontribusi dengan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menyediakan fasilitas pendidikan, serta memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Meskipun kontribusinya cukup berarti, peran sektor swasta masih bersifat tambahan dan belum menjadi bagian utama dalam sistem kebijakan pendidikan.

Keempat, masyarakat atau komunitas memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi pendidikan, terutama melalui kegiatan pendidikan nonformal, gerakan literasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat mencerminkan pendekatan dari bawah dalam kebijakan publik, namun masih menghadapi kendala dalam akses dan kapasitas.

Kelima, media berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi, mendidik publik, dan mengawasi kebijakan pendidikan. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas. Namun, dalam praktiknya, peran media dalam sinergi pentahelix pendidikan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Secara keseluruhan, meskipun kelima aktor dalam model pentahelix terlibat dalam kebijakan pendidikan di Surabaya, kolaborasi antar aktor belum berjalan secara efektif. Ini terlihat dari masih kurangnya integrasi program, minimnya koordinasi berkelanjutan, serta belum adanya platform kolaborasi yang terstruktur. Kondisi ini sejalan dengan temuan di jurnal SINTA seperti yang dipublikasikan di *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2024) dan *JPPM* (2023) yang menyebutkan bahwa keberhasilan model pentahelix sangat tergantung pada integrasi peran aktor, kejelasan fungsi, dan keberlanjutan Kerjasama.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang Peran Kebijakan Publik dalam Mengoptimalkan Kerjasama Pentahelix untuk Mewujudkan Pendidikan Berkualitas (SDGs 4) di Surabaya, dapat disimpulkan Pertama, kebijakan publik di Surabaya telah beralih ke pendekatan kerja sama dengan melibatkan berbagai pihak dalam kerangka pentahelix, yang mencakup pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media. Dinas Pendidikan Kota Surabaya berfungsi sebagai penghubung utama untuk membangun kolaborasi ini, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan terintegrasi dalam sistem kebijakan yang menyeluruh. Kedua, dilihat dari sudut pandang Collaborative Governance, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi beberapa tantangan dalam aspek-aspek penting, seperti kondisi awal yang belum merata (perbedaan sumber daya dan kapasitas), proses kolaboratif

yang belum berkelanjutan, serta masih terjadinya ego sektoral di antara para aktor. Namun, dalam hal desain institusi dan kepemimpinan yang memfasilitasi, pemerintah telah menunjukkan usaha untuk memberikan kerangka kebijakan dan mendorong kerja sama antar sektor. Ketiga, dalam konteks Teori Jaringan, kolaborasi pentahelix di sektor pendidikan di Surabaya telah membentuk suatu jaringan kebijakan, tetapi kualitas dari jaringan itu masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi, komunikasi, dan pertukaran sumber daya di antara para aktor. Sebagai akibatnya, pelaksanaan kebijakan kolaboratif belum mampu memberikan efek yang seimbang terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Keempat, penerapan model pentahelix memiliki potensi signifikan untuk mendukung pencapaian SDGs 4 (pendidikan berkualitas), namun saat ini masih bersifat terpisah dan belum terintegrasi secara sistematis. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap peran kebijakan publik agar dapat menggabungkan semua aktor dalam satu kerangka kerja sama yang berkelanjutan dan memberikan hasil yang nyata.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran kebijakan publik dalam mengoptimalkan sinergi Pentahelix untuk mewujudkan pendidikan berkualitas (SDGs 4) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kelembagaan kolaboratif berbasis Pentahelix melalui pembentukan wadah yang lebih terstruktur dan memiliki kejelasan peran serta mekanisme kerja. Langkah ini penting agar kolaborasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung secara konsisten dan terintegrasi dalam kebijakan pendidikan.

Kedua, peningkatan kapasitas para aktor Pentahelix menjadi hal yang krusial, baik dari aspek sumber daya manusia maupun pemanfaatan teknologi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan bersama yang berfokus pada penguatan kepemimpinan kolaboratif, peningkatan literasi digital, serta kemampuan dalam mengelola program lintas sektor, sehingga kesenjangan kapasitas antar aktor dapat diminimalkan.

Ketiga, pengembangan sistem kolaborasi berbasis digital perlu didorong sebagai sarana untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Platform ini diharapkan mampu menjadi media berbagi informasi, integrasi program, serta mendukung keberlanjutan interaksi antar aktor secara lebih efektif. Keempat, integrasi kebijakan lintas sektor perlu ditingkatkan melalui penyusunan kerangka kebijakan yang lebih terpadu.

Dengan adanya integrasi tersebut, berbagai program yang dijalankan oleh masing-masing aktor dapat saling mendukung dan tidak berjalan secara terpisah. Kelima, penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kolaboratif perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menilai efektivitas sinergi antar aktor. Evaluasi yang melibatkan seluruh pihak diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan ke depan.

Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan sinergi Pentahelix dalam kebijakan pendidikan di Kota Surabaya dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu meningkatkan kualitas, pemerataan, dan inklusivitas pendidikan secara berkelanjutan serta mendukung pencapaian SDGs 4.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun (2021). *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021_2026*
- Renja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun (2024). *Tentang_Perubahan_renja_tahun_2024_dinas_pendidikan_7694_0.pdf*

- Perwali Surabaya No. 16 Tahun (2021). *Tentang mengatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja JDIH Surabaya Dinas Pendidikan Kota Surabaya*
- Rachman. E., & Thalib.T. *The role of multi-stakeholder collaboration in advancing msmes and creative economy: insight from Gorontalo's pentahelix policy model. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 15, 2.*
- AS. A. Z., & Rohayatin. T. (2025). *Evaluation of collaborative Governance in Realizing Bureaucratic Reform thought Smart City Implementation in Cimahi City . Vol 17, No. 2.*
- Muklis. A., Hidayat. T. H., & Nariyah. H. (2025). *Collaborative Governance Pentahelix Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Di Kabupaten Cirebon.*
- Rahadian. E. M., Sanafiah. A. A., & Asropi. A. (2024). *Implementation of the Pentahelix Collaborative Governance Model Minimum Service Standards (SPM) for Health with Hypertension in Local Government.*
- Khotimah K., Sintiawati. N., Hilmi. I. M., & Kusumawardani. E. *Pentahelix Education: Collaborative Synergy to Reduce Stunting Prevalence. Jurnal JPPM.*
- Pasaribu. J. A., Suradika. A., Mawar, & Andriansyah. (2025). *Collaborative waste management though pentahelix stakeholder participation: A qualitative from South Tangerang City, Indonesia.*
- Wulandari. S., Suprpti., Septian. E., & Ximenes. M. (2025). *Pentahelix Collaboration as a Formulation for Comabting Sexual Harassment in Higher Education: A Systematic Literature Review.*
- Rachman. A., & Thalib, M. (2024). *Kolaborasi Pentahelix dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Jurnal Administrasi Publik. Vol 12, No 1.*
- Sutrisno, E., &Wibowo, A. (2020). *Collaborative governance dalam Kebijakan Publik di Indoenesia. Jurnal Imu Administrasi Negara. Vol, No. 2.*
- Pratama, R. A., & Nugroho, R. (2021). *Model Pentahelix dalam pembangunan sektor pendidikan di Indonesia. Vol 12, No. 1.*
- Hidayat, R., & Kurniawan, B. (2022). *Sinergi stakeholder dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui pendekatan pentahelix. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik. Vol 9, No. 2.*
- Krik Emerson, Tina Nabatchi, & Balogh, S (2017). *An Integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol 27, No. 1.*
- John M. Bryson, Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2020). *Designing and implementing cross-sector collaborations: Needed and challenging. Public Administration Review. Vol 80, No. 4.*
- Brian W.Head (2019). *Forty years of wicked problems literature: Forging closer links to policy studies. Policy and Society. Vol 38, No. 2.*
- Kurniawan, A., & Sari, M. (2021). *Collaborative governance dalam peningkatan layanan pedidikan di indonesia*
- Ramadhani, D., & Putra, F. (2022). *Peran Pentahelix dalam pengembangan sektor pendidikan berbasis kolaborasi. Jurnal Kebijakan Publik. Vol, No. 1.*
- Lestari, N., & Hidayat, T. (2020). *Sinergi stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan Pentahelix. Jurnal Pendidikan. Vol, No. 2.*
- Wibowo, H., & Prasetyo, D. (2023). *Implementasi Kebijakan pendidikan berbasis kolaborasi dalam perspektif Pentahelix. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol 9, No. 1.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia. <https://sdgs.bapenas.go.id> Diakses 20 April 2026*
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Voluntary Local Review (VLR). Kota Surabaya. <https://surabaya.go.id> Diakses 20 April 2026*
- Statistik Pendidikan Kota Surabaya. <https://surabayakota.bps.go.id> Diakses 20 April 2026

Dashboard SDGs Surabaya. <https://sdgs.surabaya.go.id> Diakses April 2026

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA